

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil peneliti, disajikan dalam bentuk Analisa antara indikator teori yang digunakan dengan fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pembahasan ini akan disesuaikan dengan teori indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) dalam (Darin et al., 2022) yaitu adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses, dan Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Berikut hasil pembahasan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat yaitu sebagai berikut:

5.1 Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat

Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat merupakan media untuk memudahkan masyarakat agar dapat terlibat secara langsung untuk meningkatkan partisipasi. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, diadakan awal tahun untuk anggaran ditahun berikutnya, kegiatan musrenbang berawal dari tahap pra musrenbang tingkat RT/RW, Lalu ke tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota. Dengan adanya pihak- pihak yang terlibat untuk menampung aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan merasa keterlibatan mereka adalah hal yang cukup penting. Partisipasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman secara aktif dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap penyelenggara perencanaan pembangunan. Pada dasarnya musrenbang ini adalah kegiatan untuk menggali kebutuhan masyarakat, Sedangkan partisipasi merupakan kunci awal musyawarah sebagai budaya yang patut untuk dilestarikan. Adanya musyawarah diharapkan agar tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum, Kegiatan musrenbang dikonsepsi agar masyarakat dapat berpartisipasi sejak Pra

musrenbang sampai dengan tahap musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan untuk penentuan keputusan prioritas pembangunan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat suatu kelompok untuk mewadahi aspirasi masyarakat melalui usulan yang diberikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap awal tahun, dari pernyataan informan dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi masyarakat dengan usaha yang dilakukan pemerintah Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat dengan mengundang unsur masyarakat agar dapat hadir musrenbang melalui sosialisasi pada saat adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan setempat seperti contohnya dalam kegiatan gotong royong atau nyaba kampung, lalu selain itu melalui surat undangan untuk selanjutnya RT atau RW membantu menginformasikan kepada masyarakat secara luas dan tentunya dari sosialisasi tersebut diharapkan bahwa masyarakat bisa menyerap hal-hal penting apa saja yang telah disampaikan serta memudahkan bagi masyarakat dalam mencari informasi agar dapat memahami mekanisme musrenbang.

Masyarakat yang terlibat mempunyai hak dalam mengemukakan pendapatnya apabila mereka mempunyai permasalahan pembangunan di wilayahnya untuk diusulkan dalam kegiatan musrenbang. Namun dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan usulan dalam forum musrenbang karena perihal waktu penyelenggara musrenbang yang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien, dimana pada waktu tersebut hanya memungkinkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesibukan tertentu saja yang dapat menghadiri, sedangkan masyarakat yang mempunyai kesibukan tidak dapat menghadiri musrenbang. Sejalan dengan penelitian (Fahmi et al., 2018) Dari hasil observasi yang diamati, ditinjau dari segi bentuk peranan aparatur pemerintah desa yakni tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan aparatur pemerintah desa di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti belum optimal karena aparatur pemerintah belum menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan banyak dari

masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan sehingga pihak Desa hanya melibatkan beberapa pihak yang dianggap mewakili masyarakat saja.

5.2 Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses

Pada indikator ini, diharapkan masyarakat dan pihak- pihak terkait dapat memberikan kontribusinya agar tujuan dari kegiatan musrenbang dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam proses tersebut mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrenbang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat dapat terbentuk dari berbagai macam cara, seperti adanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan masyarakat yang termotivasi dengan keadaan di lingkungannya untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbang.

Keterlibatan masyarakat sering disebut hanya sebatas tahap pelaksanaan saja karena pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tingkat atas yakni pemerintahan. Berkaitan dengan perihal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Bentuk kontribusi pemerintahan daerah adalah untuk mewadahi aspirasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan berlaku. Dalam hal ini masyarakat berkontribusi atau berpartisipasi untuk memberikan sumbangan ide usulan seperti menyampaikan terkait perbaikan drainase atau perbaikan jalanan yang rusak.

Adanya dorongan masyarakat yang sudah berpartisipasi adalah sebagai penggerak bagi masyarakat yang belum terlibat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan usulan dengan menghadiri kegiatan musrenbang. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan musrenbang ini adalah karena masyarakat ingin membangun wilayahnya masing- masing dari bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dapat dikatakan bahwa unsur masyarakat Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrenbang disertai dengan keaktifan dalam forum menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini

terlihat jelas pada daftar usulan musrenbang dimana usulan yang datang dari masyarakat sangat banyak dan bahkan sebelum dibukanya usulan masyarakat sudah ada yang terlebih dahulu menyampaikan usulannya kepada pihak yang terlibat hal ini dilakukan agar usulan tersebut dapat masuk ke skala prioritas.

Hasil analisis indikator kemampuan masyarakat terlibat pada kegiatan musrenbang yaitu masyarakat Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat terlibat dalam partisipasi pada tahap perencanaan pembangunan dan pemberdayaan sebagai sasaran dari kegiatan musrenbang tersebut. Sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait. Namun seharusnya semua unsur masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung dengan menyampaikan pada pelaksanaan musrenbang maupun secara tidak langsung melalui RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan sah yang dapat mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan musrenbang sudah mendukung dan mempunyai keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat. Sikap dari sebagian masyarakat sangat antusias, namun terdapat juga masyarakat yang belum merespon baik terkait kegiatan musrenbang tersebut dikarenakan menurut pendapat mereka bahwa sebenarnya masyarakat sudah berpartisipasi pada penyelenggara musrenbang pada tahun sebelumnya. Namun, karena ada suatu hal permasalahan mengenai usulan di wilayahnya yang mungkin tidak dapat terealisasi maka sebagian masyarakat menganggap partisipasi masyarakat ini hanya sebuah formalitas saja karena ketika mereka ada pun usulannya tidak dianggap ada. Sejalan dengan penelitian (Shabrina Rahmah, 2022) bahwa masyarakat awalnya antusias untuk ikut dalam proses musrenbang mereka menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Namun, nyatanya tidak dan kekecewaan ini berdampak pada menurunnya minat masyarakat dalam proses musrenbang tahun berikutnya.

Tidak terlibatnya masyarakat dalam memutuskan usulan terkait dengan pembangunan menyebabkan partisipasi ini hanya bersifat satu arah saja, dalam hal ini diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan dorongan motivasi kepada

masyarakat agar pandangan tersebut dapat diubah. Dengan demikian sangat besar harapan antara masyarakat dan pihak pemerintah dapat bersinergis agar dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan musrenbang ini.

5.3 Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pada indikator adanya akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sebagai bentuk dari perwujudan dari *good governance* yang baik dimana setiap masyarakat berhak untuk memiliki suara dalam menyampaikan pendapat dan diharuskan pemerintah juga dapat menerima kritik serta saran yang telah disuarakan oleh masyarakat.

Hasil analisis dari indikator kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada kegiatan musrenbang yaitu masyarakat telah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak- pihak yang terlibat seperti pihak pemerintah sebagai penyelenggara maupun RT dan RW sebagai penyambung aspirasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya sehingga menghasilkan partisipasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan menyampaikan pendapat, maka masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan serta ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan negara. adanya musrenbang ini bagi masyarakat adalah dapat menyampaikan usulan perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dengan bertanggung jawab secara penuh. Tanggung jawab ini dilihat dari sejauh mana pemerintah, dan masyarakat konsisten dalam melaksanakan kegiatan musrenbang dan rasa tanggung jawab. Namun, dengan berbedanya wilayah maka berbeda pula rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Selain dari pihak masyarakat pihak pemerintah pun sudah menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dengan upaya membentuk rasa tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang merasa bahwa sosialisasi belum merata, hal ini dibuktikan pada saat adanya kegiatan gotong royong, yang di hadirkan oleh Lurah Sawah, masyarakat mengeluh karena di depan rumahnya terdapat jalanan yang berlubang dan pada saat itu masyarakat berbincang dengan bapak lurah dan ingin mengajukan permasalahan tersebut dalam usulan musrenbang, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui apa saja kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi, maka usulan masyarakat tersebut tidak dapat diproses begitu saja karena harus jelas dan sesuai peraturan ketika menyampaikan usulan perbaikan.

Faktor penghambat dalam kegiatan musrenbang yaitu alokasi dana yang dibatasi, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami musrenbang. Namun, menurut kepala kecamatan tidak adanya faktor penghambat untuk sejauh ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari pihak- pihak terkait yang mengatakan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang. Sejalan dengan penelitian (Setiawan et al., 2020) bahwa faktor eksternal yang paling dominan menghambat masyarakat berpartisipasi di Desa Pulau Pinang yaitu masih kurangnya pemberian sosialisasi dan pemahaman dari Pemerintah Desa Pulau Pinang kepada masyarakat tentang musrenbang dan pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam musrenban